

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

5

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2023
											<input checked="" type="checkbox"/>		

Sarana-Prasarana Pendidikan Belum Merata

Pihaknya melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang ada di Lampung dalam melakukan pengajuan kelengkapan dan kelayakan sarana prasarana pendidikan.

SILVIA AGUSTINA
silvia@lampungpost.co.id

KETIDAKMERATAAN sarana dan prasarana pendidikan di Provinsi Lampung hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Sulpakar, mengatakan pihaknya melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang ada di

Lampung dalam melakukan pengajuan kelengkapan dan kelayakan sarana prasarana pendidikan.

Pengajuan tersebut diajukan ke Pemerintah Pusat sebagai salah satu bentuk upaya penyelesaian tidak meratanya fasilitas penunjang pendidikan. "Setiap tahun kita sudah isi dapodik, termasuk mengisi semua kebutuhan terkait tenaga pendidik maupun sarana prasarana," ujar dia, baru-baru ini.

Menurut dia, hal itu tetap membutuhkan sokongan dana dari Pemerintah Pusat. "Kebijakan dari kement-

"selain pembiayaan dari pemerintah, yaitu dana BOS, perlu ada pembiayaan pendidikan yang bersumber dari partisipasi masyarakat."

rian melakukan evaluasi terhadap hal ini, kita juga daerah melakukan pendampingan atas usulan yang

diajukan," kata dia.

Pembiayaan pendidikan merupakan faktor penting guna menunjang terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Keterbatasan pembiayaan pendidikan berdampak pada keterlambatan dalam percepatan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, termasuk dalam hal pemenuhan sarana prasarana.

Kesamaan Persepsi

Untuk mendapatkan solusi atas masalah pemerataan perlu adanya kesamaan persepsi akan pentingnya pendidikan berkualitas di Lampung. "Baik dari sisi pemerintah, satuan pendidikan, maupun masyarakat, atau orang tua peserta didik. Agar menuju pen-

didikan yang berkualitas, dibutuhkan SDM bermutu dan sarana prasarana yang lengkap. Butuh harmonisasi antar pihak-pihak itu," kata dia.

Sulpakar menyebut hingga saat ini pendidikan yang masuk kategori berkualitas baik atau berhasil melampaui standar nasional pendidikan (SNP) masih tersentral di wilayah Kota Metro, Kota Bandar Lampung, dan

Pringsewu. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat untuk turut mendukung pembiayaan pendidikan meningkat.

"Selain pembiayaan dari pemerintah, yaitu dana BOS, perlu ada pembiayaan pendidikan yang bersumber dari partisipasi masyarakat," ujarnya. (D1)

fs